

RENSTRA 2025-2029



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN PONOROGO**

KATA PENGANTAR

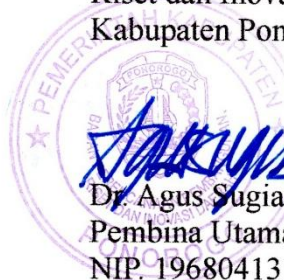
Segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan.

Semoga Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Kami berharap dokumen ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Kabupaten Ponorogo serta menjadi landasan strategis dalam menghadapi dinamika pembangunan ke depan. Kritik dan saran dari berbagai pihak sangat kami harapkan guna penyempurnaan perencanaan yang lebih baik di masa mendatang. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini.

Diharapkan penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 ini memperoleh keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Ponorogo, 19 September 2025

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Ponorogo



Dr. Agus Sugiarto, M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196804131988091002

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| DAFTAR TABEL..... | iv |
| DAFTAR GAMBAR..... | v |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Dasar Hukum Penyusunan..... | 2 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 5 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 5 |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH..... | 7 |
| 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah..... | 7 |
| 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah..... | 7 |
| 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah | 16 |
| 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... | 21 |
| 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan..... | 27 |
| 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat | 27 |
| 2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah | 28 |
| 2.2.2 Isu Strategis | 28 |
| BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN . | 33 |
| 3.1 Tujuan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo | 39 |
| 3.2 Sasaran Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo | 40 |
| 3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 | 43 |
| 3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029..... | 45 |
| 3.5 Definisi Operasional dan Formula Perhitungan IKU OPD dan Program..... | 47 |

| | |
|--|------------|
| BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... | 49 |
| 4.1 Uraian Program..... | 49 |
| 4.2 Uraian Kegiatan | 52 |
| 4.3 Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif | 67 |
| 4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah..... | 93 |
| 4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah..... | 102 |
| 4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)..... | 102 |
| BAB V PENUTUP | 104 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|-----|
| Tabel 2-1 Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin | 17 |
| Tabel 2-2 Status Kepegawaian Tahun 2025 | 17 |
| Tabel 2-3 Komposisi Karyawan Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025 | 17 |
| Tabel 2-4 Komposisi Pegawai Menurut Diklat Struktural Tahun 2025 | 18 |
| Tabel 2-5 Jumlah Pegawai Menurut Pangkat/Golongan Tahun 2025 | 18 |
| Tabel 2-6 Sarana dan Prasarana Kantor Bapperida Tahun 2025 | 20 |
| Tabel 2-7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo | 24 |
| Tabel 2-8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo | 26 |
| Tabel 2-9 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah | 30 |
| Tabel 3-1 Program Pembangunan Daerah | 35 |
| Tabel 3-2 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra | 41 |
| Tabel 3-3 Penahapan Renstra | 44 |
| Tabel 3-4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD | 46 |
| Tabel 4-1 Uraian Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | 50 |
| Tabel 4-2 Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif | 65 |
| Tabel 4-3 Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah | 91 |
| Tabel 4-4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah | 100 |
| Tabel 4-5 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) | 100 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|---|
| Gambar 2-1 Struktur Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | 9 |
|--|---|

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo disusun untuk mendukung visi dan misi daerah, serta melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bapperida. Dokumen ini menjabarkan RPJMD secara sistematis selama lima tahun dan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program/kegiatan, target indikator kinerja, serta pagu dana indikatif beserta sumber pembiayaannya.

Mengacu pada Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah memiliki fungsi dalam melakukan penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan serta bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, dan inovasi; pelaksanaan tugas dukungan teknis pada bidang-bidang tersebut; pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis; pembinaan teknis terhadap penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah; serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Dalam penyusunan Renstra ini, diperhitungkan perubahan lingkungan strategis dalam sistem perencanaan pembangunan serta berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi Bapperida, terutama yang berkaitan dengan isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah. Dengan adanya Renstra ini, diharapkan membuat perencanaan pembangunan daerah lebih efektif, efisien, terarah, terpadu, dan berkelanjutan, sehingga program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan visi Kabupaten Ponorogo.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 disusun atas dasar:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 927 Tahun 2011);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 (8), Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 27);
24. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 dijabarkan sebagai berikut:

- a. Maksud penyusunan Rencana Strategis Bapperida Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 adalah menyediakan kebijakan arahan sekaligus pedoman atau acuan secara umum dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun, sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
- b. Tujuan penyusunan Rencana Strategis Bapperida Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 adalah sebagai pedoman bagi aparatur dalam melaksanakan visi, misi, dan program, menyusun Rencana Kerja Tahunan, serta memastikan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, sekaligus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

- 3.1 Tujuan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo

- 3.2 Sasaran Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo
- 3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029
- 3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

- 4.1 Uraian Program
- 4.2 Uraian Kegiatan
- 4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif
- 4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
- 4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
- 4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Bab V Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi daerah. Bapperida dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam penyelenggaraan pelayanan, Bapperida berperan dalam menyediakan dukungan teknis, koordinasi, dan fasilitasi perencanaan pembangunan daerah. Bentuk pelayanan tersebut meliputi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja), penyediaan data dan informasi pembangunan, fasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi pembangunan, serta pengembangan riset dan inovasi untuk mendukung pengambilan kebijakan daerah.

Dengan demikian, Bapperida memberikan pelayanan strategis yang tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga menjadi jembatan koordinasi antarperangkat daerah, masyarakat, akademisi, swasta, serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang terarah, terukur, dan berkelanjutan.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

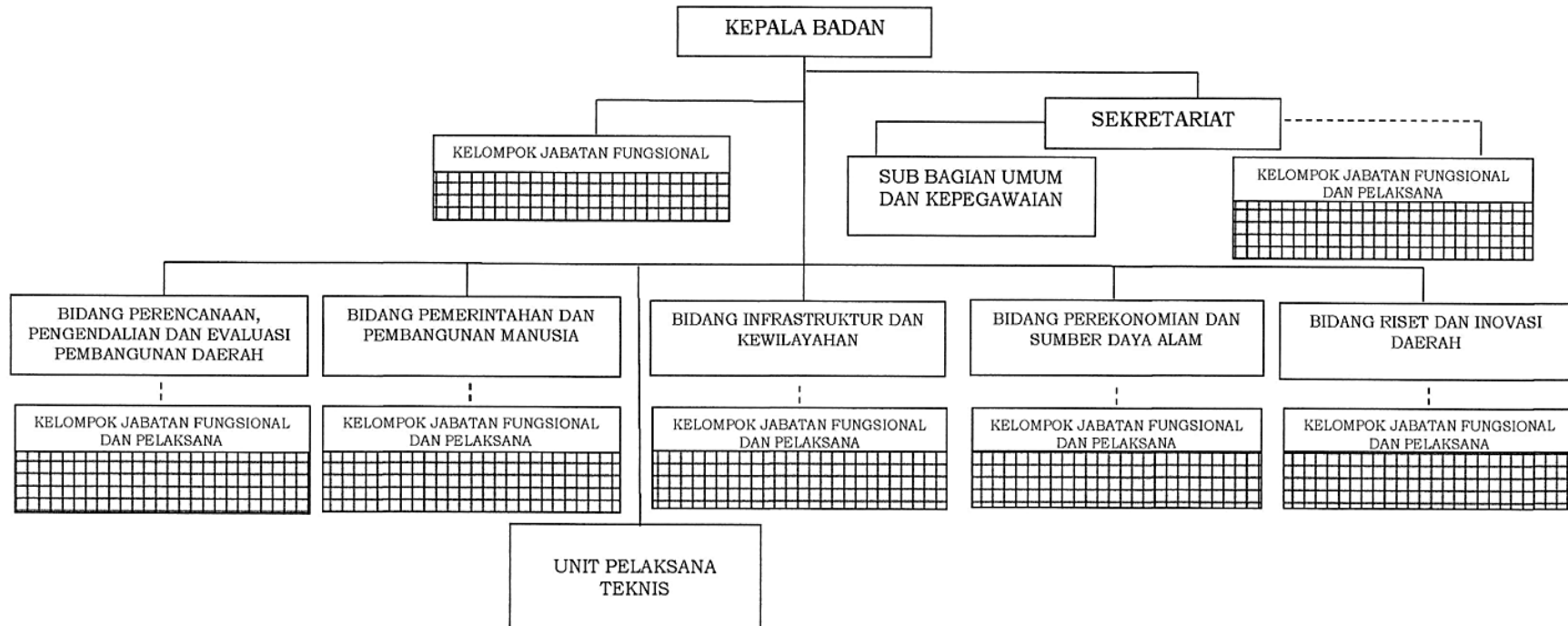
Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 40 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, menguraikan bahwa Bapperida memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah bidang perencanaan dan bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi. Sedangkan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo adalah :

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
5. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
6. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
7. Bidang Riset dan Inovasi Daerah, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
8. UPT; dan
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2-1 Struktur Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah



Untuk lebih jelasnya tugas dan fungsi susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

1. **Kepala Badan** mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan serta memberikan pembinaan administrasi di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.
2. **Sekretariat** mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga Badan.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengekoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Badan secara terpadu dan tugas pelayanan administratif;
- b. Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Badan;
- c. Penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan sistem pengendalian internal;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- e. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan dan kepustakaan Badan;
- f. Pengelolaan aset dan perlengkapan Badan;
- g. Pengelolaan sarana dan prasarana, keamanan rumah tangga Badan;
- h. Penghimpunan dan penyusunan data informasi, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Badan;
- i. Pengumpulan bahan dan pelaksanaan peningkatan kinerja organisasi Badan; dan
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sekretariat terdiri dari :

- a. **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**, mempunyai tugas:
 1. Melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi umum dan ketatalaksanaan di lingkungan Badan;
 2. Melaksanakan urusan rumah tangga dan keamanan Badan;

3. Pelaksanaan perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan perawatan sarana prasarana, aset, dan barang milik daerah pada Badan;
4. Menyelenggarakan kegiatan humas, protokoler, menyiapkan bahan pelaksanaan informasi dan publikasi;
5. Menyelenggarakan kegiatan perjalanan dinas badan;
6. Mengelola administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Badan; dan
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan.

3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyusun kebijakan teknis penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan serta informasi Pembangunan daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis pada bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- b. Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi perencanaan Pembangunan daerah;
- c. Penyajian data-data perencanaan pembangunan daerah dan hasil-hasil pelaksanaan Pembangunan daerah;
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan mitra bidang dalam rangka penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja Perangkat Daerah;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan mitra bidang dalam rangka pengendalian, evaluasi dan pelaporan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja Perangkat Daerah;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan mitra bidang dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan prioritas nasional, provinsi dan daerah;
- g. Penyiapan bahan dan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJPD, RPJMD, RKPD;

- h. Pelaksanaan sinkronisasi antar dokumen perencanaan; dan
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

4. **Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia** mempunyai tugas menyusun kebijakan teknis, merencanakan program, mengkoordinasikan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan urusan pendidikan, kesehatan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, transmigrasi, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa, perpustakaan, kearsipan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, urusan pemerintahan bidang perencanaan, pengawasan, kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan kesatuan bangsa dan politik, serta urusan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan program kegiatan pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- b. Pelaksanaan pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- c. Penyajian data-data perencanaan pembangunan daerah dan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- d. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. Pengendalian dan evaluasi dan pelaporan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

- f. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan prioritas nasional, provinsi dan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- g. Penyiapan bahan dan pendukung pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD;
- h. Pelaksanaan sinkronisasi antar dokumen perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

5. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas menyusun kebijakan teknis, merencanakan program, mengkoordinasikan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kebencanaan, Lingkungan Hidup, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan program kegiatan pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- b. Pelaksanaan pengolahan data dan informasi perencanaan Pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- c. Penyajian data-data perencanaan pembangunan daerah dan hasil-hasil pelaksanaan Pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- d. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- e. Pengendalian dan evaluasi dan pelaporan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;

- f. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan prioritas nasional, provinsi dan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- g. Penyiapan bahan dan pendukung pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD;
- h. Pelaksanaan sinkronisasi antar dokumen perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

6. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyusun kebijakan teknis, merencanakan program, mengkoordinasikan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan urusan Pangan, Koperasi Usaha Mikro, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Sumber Daya Alam, Perdagangan dan Perindustrian serta Keuangan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan program kegiatan pada bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- b. Pelaksanaan pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- c. Penyajian data-data perencanaan pembangunan daerah dan hasil-hasil pelaksanaan Pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- d. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- e. Pengendalian dan evaluasi dan pelaporan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

- f. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan prioritas nasional, provinsi dan daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- g. Penyiapan bahan dan pendukung pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD;
- h. Pelaksanaan sinkronisasi antar dokumen perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

7. **Bidang Riset dan Inovasi Daerah** mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- b. Penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Riset dan Inovasi, kerjasama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah;

- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervise di Bidang Riset dan Inovasi, kerjasama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah;
 - e. Pemantauan dan evaluasi Penelitian, Pengembangan, penyelenggaraan Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah;
 - f. Pelaksanaan pembangunan, Pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
 - g. Koordinasi pelaksanaan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi Penelitian lainnya di daerah;
 - h. Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah; dan
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional** mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia Aparatur

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo didukung oleh sumber daya manusia aparatur sebanyak 49 (empat puluh sembilan) orang pada tahun 2025. Jumlah dan kualifikasi aparatur yang tersedia menjadi modal penting dalam mendukung efektivitas perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan daerah secara terintegrasi dan berkesinambungan. Rincian jumlah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2-1 Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin

| No | JENIS KELAMIN | JUMLAH (Orang) |
|---------------|---------------|----------------|
| 1 | PNS | |
| | - Laki- Laki | 18 |
| | - Perempuan | 23 |
| 2 | PPPK | |
| | - Laki-Laki | 4 |
| | - Perempuan | 2 |
| 3 | HONORER | |
| | - Laki- Laki | 5 |
| | - Perempuan | 4 |
| JUMLAH | | 56 |

Tabel 2-2 Status Kepegawaian Tahun 2025

| No | STATUS KEPEGAWAIAN | JUMLAH (Orang) |
|---------------|--------------------|----------------|
| 1 | PNS | 41 |
| 2 | PPPK | 6 |
| 3 | Honoror | 9 |
| JUMLAH | | 56 |

Tabel 2-3 Komposisi Karyawan Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025

| No | TINGKAT PENDIDIKAN | JUMLAH (Orang) |
|----|---------------------|----------------|
| 1 | Doktoral (S-3) | 2 |
| 2 | Pasca Sarjana (S-2) | 7 |
| 3 | Sarjana (S-1) | 38 |

| | | |
|---------------|---------|-----------|
| 4 | Diploma | 4 |
| 5 | SLTA | 5 |
| 6 | SLTP | - |
| 7 | SD | - |
| JUMLAH | | 56 |

Tabel 2-4 Komposisi Pegawai Menurut Diklat Struktural Tahun 2025

| No | JENIS DIKLAT | JUMLAH (Orang) |
|---------------|--------------------------|----------------|
| 1 | ADUM (DIKLATPIM TK.IV) | 6 |
| 2 | SPAMA (DIKLATPIM TK.III) | 4 |
| 3 | SPAMEN (DIKLATPIM II) | - |
| JUMLAH | | 10 |

Tabel 2-5 Jumlah Pegawai Menurut Pangkat/Golongan Tahun 2025

| No | PANGKAT/GOLONGAN | JUMLAH (Orang) |
|----|-------------------------------|----------------|
| 1. | PNS | |
| | Pembina utama (IV/e) | - |
| | Pembina utama madya (IV/d) | - |
| | Pembina utama muda (IV/c) | 1 |
| | Pembina Tingkat 1 (IV/b) | 1 |
| | Pembina (IV/a) | 4 |
| | Penata tingkat 1 (III/d) | 11 |
| | Penata (III/c) | 4 |
| | Penata Muda Tingkat 1 (III/b) | 8 |
| | Penata muda (III/a) | 9 |

| | | |
|-----------|--------------------------------|-----------|
| | Pengatur tingkat 1 (II/d) | 2 |
| | Pengatur (II/c) | 1 |
| | Pengatur Muda Tingkat 1 (II/b) | - |
| | Pengatur muda (II/a) | - |
| | Juru tingkat 1 (I/d) | - |
| | Juru (I/c) | - |
| | Juru muda tingkat I (I/b) | - |
| | Juru muda (I/a) | - |
| | JUMLAH | 40 |
| 2. | PPPK | |
| | Golongan V | 1 |
| | Golongan IX | 5 |
| | JUMLAH | 6 |
| 3. | HONORER | |
| | Sarjana | 4 |
| | Diploma | 1 |
| | SLTA | 4 |
| | SLTP | - |
| | SD | - |
| | JUMLAH | 9 |
| | TOTAL | 56 |

2. Sarana dan Prasarana

Kantor Bapperida Kabupaten Ponorogo terletak di Jalan Aloon-Aloon Utara No.4 Ponorogo Kode Pos 63413, di atas tanah seluas 2.000 M2, dengan bangunan 2 (dua) lantai seluas 3.000 m². Kebutuhan tentang ruangan kerja dan ruang pertemuan sudah cukup memenuhi tuntutan dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi sehingga kelancaran pelaksanaan tugas di harapkan dapat berjalan secara optimal.

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo telah tersedia sarana dan prasarana sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2-6 Sarana dan Prasarana Kantor Bapperida Tahun 2025

| No | Nama | Jumlah | Keterangan |
|----|-----------------------|--------|------------|
| 1 | Mobil | 5 | Baik |
| 2 | Sepeda Motor | 23 | Baik |
| 3 | Komputer | 41 | Baik |
| 4 | Laptop | 27 | Baik |
| 5 | IPad | 1 | Baik |
| 6 | Faximile | 1 | Baik |
| 7 | Printer | 44 | Baik |
| 8 | Scanner | 1 | Baik |
| 9 | Mesin Fotocopy | 1 | Baik |
| 10 | LCD | 4 | Baik |
| 11 | Kamera | 4 | Baik |
| 12 | Meja Kerja | 61 | Baik |
| 13 | Kursi Kerja | 56 | Baik |
| 14 | Sound System | 4 | Baik |
| 15 | Router | 8 | Baik |
| 16 | Wireless Access Point | 1 | Baik |
| 17 | Switch | 4 | Baik |
| 18 | Server | 1 | Baik |

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu lembaga yang memiliki fungsi perencanaan dan penelitian pengembangan. Lembaga ini berperan penting dalam menghasilkan perencanaan pembangunan daerah berupa dokumen perencanaan baik jangka panjang, menengah dan tahunan yang akuntabel serta dokumen hasil penelitian berupa rekomendasi yang akan di pakai sebagai acuan satuan kerja perangkat daerah lain dalam pengembangan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Ponorogo. Sedangkan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan terhadap rencana yang telah di tentukan, maka Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melalui:

1. Monitoring dan evaluasi;
2. Melaksanakan forum perencanaan bidang pembangunan;
3. Menyusun dokumen perencanaan;
4. Penyedia informasi perencanaan pembangunan;
5. Melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Ponorogo, dan menghadiri Musrenbang Kecamatan sebagai narasumber;
6. Mengadakan diseminasi dan sosialisasi produk perencanaan (jangka panjang, menengah dan tahunan);
7. Melakukan penelitian dan pengembangan serta fasilitasi inovasi daerah

Secara garis besar sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, kinerja pelayanan yang dicapai selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

1. Tersusunnya RPJMD Kabupaten Ponorogo 2025- 2029.
2. Tersusunnya dokumen hasil penelitian dan kajian serta fasilitasi inovasi dan teknologi.
3. Terlaksananya penyusunan Rencana Tahunan Daerah, dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2021;

- 1) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kabupaten Ponorogo.
- 2) Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo tahun 2021 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Ponorogo.
- 3) Melakukan penelitian dan pengembangan.

Tahun 2022;

- 1) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kabupaten Ponorogo.
- 2) Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo tahun 2022 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Ponorogo.
- 3) Melakukan penelitian dan pengembangan.

Tahun 2023;

- 1) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kabupaten Ponorogo.
- 2) Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Ponorogo.
- 3) Melakukan penelitian dan pengembangan.

Tahun 2024;

- 1) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kabupaten Ponorogo.
- 2) Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 3) Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo tahun 2024 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Ponorogo.

- 4) Melakukan Penelitian dan Pengembangan serta fasilitas Pelaporan Inovasi daerah dan Indeks Daya Saing Daerah.
4. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kabupaten Ponorogo tahun 2021-2024 antara lain:
 - 1) Tersusunnya dokumen-dokumen Perencanaan.
 - 2) Tersusunnya dokumen - dokumen Penelitian dan Pengembangan.

Tabel 2-7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke | | | | Realisasi Capaian Tahun ke | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke | | | |
|-----------|--|-------------|------------|--------------------------|--|-------|-------|------|----------------------------|-------|------|------|-----------------------------|--------|--------|--------|
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Perencanaan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Indeks Kualitas Perencanaan | - | - | - | - | 80,75 | 80,85 | 80,9 | - | 81,50 | 81 | 78 | - | 100,92 | 100,18 | 96,41 |
| | Prosentase usulan yang diakomodir di dokumen perencanaan | - | - | - | 92 | - | - | - | 92 | - | - | - | 100 | - | - | - |
| | Prosentase keselarasan dokumen perencanaan | - | - | - | 84 | - | - | - | 84 | - | - | - | 100 | - | - | - |
| | Prosentase efektivitas sasaran pembangunan | - | - | - | 90 | - | - | - | 90 | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 2. | Penelitian dan Pengembangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Persentase hasil penelitian yang dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan pembangunan | - | - | - | 92 | 85 | 90 | 95 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 117,64 | 111,11 | 105,26 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|----|----|----|---|-----|-----|-----|---|-------|--------|--------|
| Persentase kebijakan inovasi daerah yang diterapkan dalam rangka meningkatkan daya saing daerah | - | - | - | - | 50 | 55 | 60 | - | 100 | 100 | 100 | - | 200 | 181,81 | 166,66 |
| Persentase implementasi rencana kelitbangan | - | - | - | - | 85 | 90 | 95 | - | 70 | 64 | 100 | - | 82,35 | 71,11 | 105,26 |

Tabel 2-8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke | | | | Rata-Rata | |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------|--------|--------|----------------------|----------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Anggaran | Realisasi |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 6.568.378. 728 | 7.286.833. 234 | 6.848.829. 334 | 7.296.777. 763 | 6.058.582. 580 | 6.584.156. 296 | 6.773.482. 321 | 7.057.914. 051 | 92,24% | 90,36% | 98,90% | 96,73% | 7.000.204. 764,75 | 6.618.533. 812 |
| Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | 1.310.976. 850 | 1.072.512. 500 | 1.058.800. 000 | 1.854.145. 100 | 1.090.582. 989 | 1.040.973. 695 | 1.057.225. 392 | 1.813.797. 017 | 83,19% | 97,06% | 99,85% | 97,82% | 1.324.108. 612,50 | 1.250.644. 773,25 |
| Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 1.287.955. 200 | 1.067.400. 000 | 912.500. 000 | 1.042.421. 471 | 993.378. 679 | 987.995. 745 | 903.267. 020 | 954.726. 416 | 77,13% | 92,57% | 98,99% | 91,59% | 1.077.569. 167,75 | 959.841. 965 |
| Program Penelitian dan Pengembangan Daerah | 605.000. 000 | 1.203.787. 500 | 968.100. 000 | 949.304. 400 | 560.632. 508 | 1.128.843. 524 | 951.389. 720 | 915.746. 154 | 92,67% | 93,78% | 98,27% | 96,46% | 931.547. 975 | 889.152. 976,5 |

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo merupakan perangkat daerah yang tidak memberikan pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Bapperida Kabupaten Ponorogo bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bapperida berperan dalam melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi perencanaan pembangunan di tingkat daerah.

Selain itu, Bapperida Kabupaten Ponorogo memiliki peran strategis dalam penyusunan berbagai kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Bapperida bertanggung jawab mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang menjadi acuan bagi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Ponorogo. Di samping itu, Bapperida juga melaksanakan fungsi pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah guna memastikan kesesuaian antara pelaksanaan program dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Dalam menjalankan fungsinya, Bapperida Kabupaten Ponorogo memfasilitasi perangkat daerah dalam penyusunan Renstra dan Renja, untuk memastikan rencana kerja selaras dengan prioritas pembangunan dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah menghadapi faktor eksternal yang dapat mendukung maupun menjadi hambatan. Oleh karena itu, Bapperida dituntut untuk merumuskan alternatif solusi terbaik dalam menangani setiap permasalahan, termasuk dalam upaya peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan daerah. Adapun tantangan yang dihadapi Bapperida Kabupaten Ponorogo dalam proses perencanaan adalah sebagai berikut:

2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi dan terjadi di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kapasitas dan jumlah aparatur fungsional perencana dalam mendukung proses perencanaan pembangunan daerah.
2. Belum optimalnya penyediaan layanan informasi pembangunan yang responsif dan akurat untuk menjawab beragam aspirasi serta kebutuhan masyarakat.
3. Belum adanya sistem data dan informasi perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan tersedia secara tepat waktu untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.
4. Belum optimalnya efektivitas proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah sehingga sering menimbulkan ketidaktepatan waktu dalam pelaksanaannya.
5. Belum optimalnya integrasi hasil riset dan inovasi ke dalam kebijakan pembangunan daerah.
6. Belum optimalnya pengembangan dan diseminasi riset serta inovasi untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah.

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo, yang selaras dengan tugas pokok dan fungsi serta isu strategis pembangunan Kabupaten Ponorogo dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas dan jumlah aparatur perencana fungsional untuk mendukung kualitas perencanaan pembangunan daerah.
2. Penguatan sistem layanan informasi pembangunan yang responsif, akurat, dan mampu mengakomodasi beragam aspirasi masyarakat.
3. Pengembangan sistem data dan informasi perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan tersedia secara tepat waktu.

4. Peningkatan efektivitas proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang tepat sasaran, partisipatif, dan berkesinambungan.
5. Penguatan integrasi hasil riset dan inovasi ke dalam kebijakan pembangunan daerah.
6. Pengembangan dan diseminasi riset serta inovasi untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan pembangunan daerah.

Tabel 2-9 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD | PERMASALAHAN PD | ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD | | | ISU STRATEGIS PD |
|---|---|--|---|---|---|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Urusan Perencanaan | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya tenaga perencana fungsional yang dapat dikembangkan melalui program pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan kompetensi untuk mendukung proses perencanaan yang lebih berkualitas. Potensi kolaborasi dengan instansi lain, perguruan tinggi, dan lembaga pelatihan untuk meningkatkan kapasitas aparatur perencana melalui studi banding, workshop, dan program peningkatan kompetensi. | Belum optimalnya kapasitas dan jumlah aparatur perencana fungsional dalam mendukung proses perencanaan pembangunan daerah. | Masih Belum Optimalnya Peningkatan SDM Daerah Melalui Peningkatan Akses Terhadap Infrastruktur Yang Memadai. | <ul style="list-style-type: none"> Sustainable Development Goals (SDGs) Perkembangan Demografi Global | <ul style="list-style-type: none"> Telaah terhadap arahan RPJPN tahun 2025-2045 pada tahap pertama (2025-2029). | <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) | Peningkatan kapasitas dan jumlah aparatur perencana fungsional untuk mendukung kualitas perencanaan pembangunan daerah. |
| <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya sistem informasi pembangunan yang dapat dimanfaatkan untuk menyediakan data dan informasi yang akurat kepada masyarakat. Adanya mekanisme dan prosedur internal yang memungkinkan pemantauan, pembaruan, dan penyebaran informasi pembangunan secara cepat dan responsif. | Belum optimalnya penyediaan layanan informasi pembangunan yang responsif dan akurat untuk menjawab beragam aspirasi serta kebutuhan masyarakat. | Belum Optimalnya Tata Kelola Administrasi Layanan Sosial Masyarakat. | <ul style="list-style-type: none"> Perkembangan Teknologi Peningkatan Urbanisasi Dunia | <ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan Standard Pelayanan Minimal (SPM), khususnya pada penyelenggaraan urusan wajib terkait pelayanan dasar | <ul style="list-style-type: none"> Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih yang dilakukan dengan transformasi teknologi untuk mendukung inovasi dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas. | Penguatan sistem layanan informasi pembangunan yang responsif, akurat, dan mampu mengakomodasi beragam aspirasi masyarakat. |

| | | | | | | |
|---|---|---|--|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya infrastruktur dan sarana teknologi informasi yang mendukung pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan secara digital. • Adanya mekanisme dan prosedur internal yang memungkinkan pemutakhiran, validasi, dan penyajian data perencanaan secara tepat waktu. | <p>Belum adanya sistem data dan informasi perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan tersedia secara tepat waktu untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.</p> | <p>Belum Optimalnya Tata Kelola Administrasi Layanan Sosial Masyarakat.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Sustainable Development Goals (SDGs) • Perkembangan Teknologi | <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan dan Peraturan Perundangan Pemerintah Pusat yang sangat cepat mengalami pergantian/ perubahan | <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih yang dilakukan dengan transformasi teknologi untuk mendukung inovasi dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas. | <p>Pengembangan sistem data dan informasi perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan tersedia secara tepat waktu.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya mekanisme dan prosedur perencanaan yang dapat dioptimalkan untuk menjamin proses perencanaan yang tepat sasaran dan berkesinambungan. | <p>Belum optimalnya efektivitas proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah sehingga sering menimbulkan ketidaktepatan waktu dalam pelaksanaannya.</p> | <p>Belum Optimalnya Tata Kelola Administrasi Layanan Sosial Masyarakat.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Perkembangan Teknologi | <ul style="list-style-type: none"> • Telaah terhadap arahan RPJPN tahun 2025-2045 pada tahap pertama (2025-2029) • Kebijakan dan Peraturan Perundangan Pemerintah Pusat yang sangat cepat mengalami pergantian/ perubahan. | <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih yang dilakukan dengan transformasi teknologi untuk mendukung inovasi dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas. | <p>Peningkatan efektivitas proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang tepat sasaran, partisipatif, dan berkesinambungan.</p> |

| Urusan Penelitian dan Pengembangan | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya sumber daya dan kelembagaan yang mampu mengelola hasil riset dan inovasi untuk dijadikan masukan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah. Adanya mekanisme koordinasi dan forum integrasi antara lembaga riset, inovasi, dan perencana daerah untuk memastikan hasil riset dapat diterapkan dalam kebijakan. Potensi kolaborasi dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan pihak terkait untuk memperkuat pemanfaatan riset dan inovasi dalam pengambilan keputusan pembangunan. | Belum optimalnya integrasi hasil riset dan inovasi ke dalam kebijakan pembangunan daerah. | Masih Belum Optimalnya Peningkatan SDM Daerah Melalui Peningkatan Akses Terhadap Infrastruktur Yang Memadai. | <ul style="list-style-type: none"> Sustainable Development Goals (SDGs) Perkembangan Teknologi | <ul style="list-style-type: none"> Telaah terhadap arahan RPJPN tahun 2025-2045 pada tahap pertama (2025-2029) Kebijakan dan Peraturan Perundangan Pemerintah Pusat yang sangat cepat mengalami pergantian/ perubahan | <ul style="list-style-type: none"> Penguatan inovasi untuk mendukung kemandirian keuangan dan daya saing daerah diimbangi dengan penguatan kapasitas fiskal. | Penguatan integrasi hasil riset dan inovasi ke dalam kebijakan pembangunan daerah. |
| <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya mekanisme dan kelembagaan untuk mengembangkan, mendiseminasikan, dan memanfaatkan riset serta inovasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah. Potensi kolaborasi dengan lembaga riset, perguruan tinggi, dan inovator untuk memperkuat diseminasi dan pemanfaatan hasil riset dalam pembangunan daerah. | Belum optimalnya pengembangan dan diseminasi riset serta inovasi untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah. | Masih Belum Optimalnya Peningkatan SDM Daerah Melalui Peningkatan Akses Terhadap Infrastruktur Yang Memadai. | <ul style="list-style-type: none"> Sustainable Development Goals (SDGs) Perkembangan Teknologi | <ul style="list-style-type: none"> Telaah terhadap arahan RPJPN tahun 2025-2045 pada tahap pertama (2025-2029) Kebijakan dan Peraturan Perundangan Pemerintah Pusat yang sangat cepat mengalami pergantian/ perubahan | <ul style="list-style-type: none"> Penguatan inovasi untuk mendukung kemandirian keuangan dan daya saing daerah diimbangi dengan penguatan kapasitas fiskal. | Pengembangan dan diseminasi riset serta inovasi untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan pembangunan daerah. |

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo dan sebagai Upaya Pemerintah Daerah memenuhi amanat peraturan perundang-undangan, khususnya:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; dan
2. Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

ditetapkan Visi Pembangunan Tahun 2025-2029 :

“MEWUJUDKAN PONOROGO HEBAT”

(Harmonis, Elok, Bergas, Amanah dan berTaqwa kepada Tuhan YME)

Penjelasan dari masing-masing elemen visi dia atas adalah sebagai berikut:

Harmonis

Menunjukkan harapan untuk terciptanya kehidupan yang penuh kedamaian dan keseimbangan antara masyarakat, budaya, dan alam di Kabupaten Ponorogo. Hubungan yang harmonis antara warga masyarakat diharapkan dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Pembangunan Ponorogo yang harmonis tercermin dalam fokus RPJMD yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat, keseimbangan sosial, serta integrasi budaya dan ekonomi. RPJMD Ponorogo menekankan pentingnya penguatan ketahanan sosial dan budaya, serta menjaga keberagaman yang ada di masyarakat Ponorogo.

Elok

Makna "elok" dalam visi ini tercermin dalam perhatian terhadap kualitas lingkungan dan keindahan alam Ponorogo. RPJMD memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang mendukung kawasan wisata dan menjaga kelestarian lingkungan. Pengelolaan lingkungan yang baik dan pembangunan yang ramah lingkungan, seperti dalam aspek teknologi dan pengelolaan sumber daya alam, menjadi bagian penting dalam perencanaan jangka menengah. Ponorogo diharapkan menjadi daerah yang menawan dan menarik bagi wisatawan maupun warganya.

Bergas

Merujuk pada semangat pantang menyerah, kerja keras, dan daya juang masyarakat Ponorogo untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan. Ini menggambarkan tekad dan semangat yang tinggi untuk membangun daerah secara berkelanjutan berbasiskan daya saing daerah. RPJMD Ponorogo berfokus pada peningkatan kapasitas UMKM, koperasi, serta produktivitas tenaga kerja yang menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing daerah. Ini termasuk dalam transformasi ekonomi, penguatan infrastruktur, serta peningkatan kualitas pendidikan untuk menciptakan generasi yang siap menghadapi tantangan ekonomi global

Amanah

Pembangunan yang amanah berarti transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pemerintahan dan pengelolaan sumber daya daerah. RPJMD Ponorogo menekankan pentingnya birokrasi yang transparan dan akuntabel serta meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang efisien. Ini juga terkait dengan kebijakan yang memprioritaskan kepentingan rakyat, serta pengelolaan pemerintahan yang inklusif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Ber-Taqwa

Aspek spiritual dalam visi ini mencerminkan pentingnya pembangunan yang berlandaskan pada nilai-nilai agama dan moral. RPJMD Ponorogo memandang pembangunan sebagai usaha untuk mewujudkan kesejahteraan yang tidak hanya material tetapi juga spiritual, melalui penguatan ketahanan sosial dan budaya, serta pengembangan karakter bangsa yang berlandaskan pada nilai-nilai spiritual dan moral, dengan masyarakat yang berakhlak baik dan menjalankan ajaran agama dengan penuh kesadaran.

Misi adalah rumusan umum yang merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 dijabarkan ke dalam 5 (lima) misi, dijalankan secara berkesinambungan dan sinergis, serta memfokuskan pada reformasi sector pertanian, pariwisata dan pengembangan sumber daya manusia sebagai basis pembangunan kemakmuran masyarakat Ponorogo yang hebat. Adapun Dengan 5 (Lima) Misi Pembangunan Tahun 2025-2029 Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:

- Misi 1 : Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlindungan Sosial
- Misi 2 : Transformasi Ekonomi Dalam Rangka Penguatan Umkm, Koperasi, BUMD, BUMDes Melalui Riset Inovasi, Implementasi Ekonomi Hijau, Transformasi Digital, Integrasi Ekonomi Wilayah Serta Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja
- Misi 3 : Penguatan Ketahanan Sosial, Budaya, Dan Ekologi
- Misi 4 : Transformasi Tata Kelola Untuk Mewujudkan Birokrasi Yang Transparan, Akuntabel, Inklusif, Bermanfaat, Serta Berdampak Secara Sosial Dan Ekonomi Berbasis Revolusi Teknologi Informasi
- Misi 5 : Pemenuhan Dan Peningkatan Kualitas Innfrastruktur Dengan Pendekatan Konektivitas Untuk Mendukung Kawasan Strategis Dan Pemerataan Pembangunan

Misi tersebut memuat 9 program prioritas Kepala Daerah yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor. Keseluruhan upaya tersebut di formulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah.

Tabel 3-1 Program Pembangunan Daerah

| No. | Program Hebat | Rencana Implementasi |
|-----|-----------------|--|
| 1. | Pertanian Hebat | <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan / Revitalisasi Embung • Irigasi Air Tanah Dalam (Sumur Dalam) • Penguatan Ketahanan Pangan • Pengembangan & pengelolaan sistem irigasi Partisipatif • Menuju Kabupaten Organik • Cadangan Pangan • Program Pertanian Terpadu |

| | | |
|----|--------------------------------|---|
| 2. | Masyarakat dan Perempuan Hebat | <ul style="list-style-type: none"> • Melanjutkan program dana RT • Program pertanian terpadu • Mendorong Desa Ramah Perempuan, anak dan disabilitas • Penguatan, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak |
| 3. | Pariwisata Hebat | <ul style="list-style-type: none"> • Melanjutkan pembangunan Monumen Reog dan Museum Peradaban • Ponorogo Kota Festival (menyelenggarakan event-event skala nasional enam kali dalam setahun) • Pengembangan Sarana prasarana Olah Raga (Sirkuit, stadion, dll) • Membangun ekosistem pariwisata • Pengembangan wisata Religi • Pengembangan Destinasi Wisata Unggulan • Penguatan Ekonomi Kreatif |
| 4. | Ekonomi dan Keuangan Hebat | <ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan UMKM dan Koperasi • Menuju PAD 1 triliun • Penguatan dan Perluasan Angkatan kerja • Penguatan Daya Saing Produk • Kemudahan dan promosi Investasi |
| 5. | Pendidikan Hebat | <ul style="list-style-type: none"> • Perpustakaan Digital • TOEFL gratis bagi siswa tingkat menengah setiap tahun • Peningkatan mutu pendidikan berbasis agama • Peningkatan Muatan Lokal Program Pendidikan • Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan |

| | | |
|----|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan Kesetaraan • Peningkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan |
| 6. | Kesehatan Hebat | <ul style="list-style-type: none"> • Dokter Keluarga • Dokter dan perawat kunjungan langsung ke rumah • Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan • Peningkatan Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat • Peningkatan Mutu dan Kualitas Pelayanan Kesehatan • Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan • Keluarga Sehat Sejahtera |
| 7. | Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Hebat | <ul style="list-style-type: none"> • Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Wilayah • Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup • Melanjutkan penataan kota untuk menciptakan pusat-pusat ekonomi baru • Resiliensi/Ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim |
| 8. | Birokrasi Hebat | <ul style="list-style-type: none"> • Membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik berbasis teknologi informasi • Tatakelola Pemerintahan yang akuntabel • Mewujudkan Ponorogo sebagai Smart City • Percepatan Transformasi Digital • SIMAS Hebat • Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan benar • Tatakelola Perencanaan Pembangunan • Tatakelola Keuangan Daerah |

| | | |
|----|------------|--|
| 9. | Desa Hebat | <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan menuju BUMDes Mandiri • Pembangunan sarana olahraga di desa • Pengembangan desa wisata • Penguatan kelembagaan pemerintahan desa melalui ADD |
|----|------------|--|

Untuk menerjemahkan visi dan misi pada RPJMD Kabupaten Ponorogo ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo, maka dapat ditelaah dari misi ke 4 (empat) dari RPJMD Kabupaten Ponorogo, sebagai berikut :

- Misi 4 : Transformasi Tata Kelola Untuk Mewujudkan Birokrasi yang Transparan, Akuntabel, Inklusif, Bermanfaat, serta Berdampak Secara Sosial dan Ekonomi Berbasis Revolusi Teknologi Informasi
- Tujuan : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah untuk menciptakan birokrasi yang efisien dan bertanggung jawab
- Tugas : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan
- Fungsi :
 1. Penyusunan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
 2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
 3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
 4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah; dan
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Sasaran : Tata Kelola Pemerintah yang bersih dan transparan, serta Pelayanan Publik yang Unggul Berbasis Elektronik

Urusan : Perencanaan

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah :

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Urusan : Penelitian dan Pengembangan

1. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi
2. Program Riset dan Inovasi Daerah
 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan
 - Invensi dan Inovasi

3.1 Tujuan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Ponorogo ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai 5 (lima) tahun yang akan datang. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo mengacu pada misi 4 (empat) yaitu:

“Transformasi Tata Kelola Untuk Mewujudkan Birokrasi yang Transparan, Akuntabel, Inklusif, Bermanfaat, serta Berdampak Secara Sosial dan Ekonomi Berbasis Revolusi Teknologi Informasi”

Guna mewujudkan misi di atas, maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo, yaitu diantaranya meliputi:

“Mewujudkan tata kelola perencanaan pembangunan daerah yang bersih, transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi untuk mendukung pelayanan publik yang unggul”.

3.2 Sasaran Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo merumuskan 2 (dua) sasaran strategis yang menjadi arah utama pencapaian kinerja organisasi. Penetapan sasaran strategis ini juga dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah berjalan lebih konsisten, terukur, dan selaras dengan visi pembangunan Kabupaten Ponorogo, sehingga dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung terwujudnya pembangunan yang berdaya saing dan berkelanjutan. Adapun sasaran yang dimaksud yaitu:

- 1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah.**
- 2. Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah.**

Tabel 3-2 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra

| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Indikator | Target Tahun | | | | | | Ket. |
|---|---|--|--|--------------|-------|-------|------|-------|-------|------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| Tata Kelola Pemerintah yang bersih dan transparan, serta Pelayanan Publik yang Unggul Berbasis Elektronik | Mewujudkan tata kelola perencanaan pembangunan daerah yang bersih, transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi untuk mendukung pelayanan publik yang unggul | | Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah | 89,24 | 89,26 | 89,28 | 89,3 | 89,32 | 89,34 | |
| | | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah | Persentase keselarasan dokumen perencanaan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | Persentase ketepatan waktu penetapan dokumen perencanaan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--|
| | | Meningkatnya peran riset dan inovasi | Persentase Kebijakan Berbasis Bukti | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| | | dalam mendukung pembangunan daerah | Indeks Daya Saing Daerah | 3.76 | 3.77 | 3.78 | 3.79 | 3.8 | 3.81 | |
| | | | Indeks Inovasi Daerah | 53,68 (Inovatif) | 54 (Inovatif) | 55 (Inovatif) | 57 (Inovatif) | 61 (Inovatif) | 61,5 (Inovatif) | |

3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029

Strategi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025–2029 disusun untuk menjamin keterpaduan, konsistensi, serta kesinambungan arah pembangunan daerah. Penyusunan strategi ini berlandaskan pada kebutuhan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berbasis data dan bukti, dengan dukungan penelitian, pengembangan, serta inovasi sebagai instrumen utama dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

Pelaksanaan strategi tidak hanya diarahkan pada pencapaian target jangka pendek, melainkan juga dimaksudkan untuk menyiapkan landasan pembangunan jangka menengah dan panjang. Dengan demikian, setiap tahapan strategi memiliki keterkaitan yang erat, dimulai dari penguatan sistem perencanaan, pengembangan kapasitas sumber daya, hingga terwujudnya kemandirian perencanaan dan inovasi daerah yang berkelanjutan.

Pendekatan strategis yang ditempuh menitikberatkan pada tiga hal pokok. Pertama, membangun sistem perencanaan pembangunan yang partisipatif, responsif, dan inklusif sehingga mampu mengakomodasi dinamika kebutuhan masyarakat serta perkembangan wilayah. Kedua, memastikan hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi dimanfaatkan secara optimal dalam perumusan kebijakan pembangunan. Ketiga, memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia agar mampu mengelola data, informasi, dan pengetahuan sebagai basis penting dalam pengambilan keputusan pembangunan.

Strategi tersebut dirancang secara bertahap, sehingga pelaksanaannya dapat terarah, sistematis, dan berkesinambungan. Rincian tahapan strategi dimaksud disajikan pada Tabel 3.3 Penahapan Renstra berikut.

Tabel 3-3 Penahapan Renstra

| TAHAP II | TAHAP III | TAHAP IV | TAHAP V | TAHAP VI |
|--|---|---|---|--|
| (2026) | (2027) | (2028) | (2029) | (2030) |
| Penguatan data dan informasi pembangunan daerah berbasis riset dan inovasi | Peningkatan kemitraan dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dan pusat inovasi dalam perencanaan pembangunan | Optimalisasi peran Bapperida dalam inovasi kebijakan serta penguatan sistem perencanaan | Evaluasi program perencanaan pembangunan dan riset daerah | Kelembagaan perencanaan, riset, dan inovasi daerah yang terintegrasi dan berkelanjutan |

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD. Arah kebijakan ini berfungsi sebagai pedoman operasional bagi perangkat daerah dalam merumuskan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan secara terarah, terukur, dan berkesinambungan.

Sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan serta penelitian, pengembangan, Bapperida memiliki kedudukan strategis dalam memastikan terselenggaranya perencanaan pembangunan yang berkualitas, partisipatif, dan berbasis bukti. Oleh karena itu, arah kebijakan Bapperida difokuskan pada penguatan fungsi perencanaan pembangunan, optimalisasi pemanfaatan hasil penelitian dan kajian, peningkatan koordinasi lintas sektor dan wilayah, serta pengembangan ekosistem riset dan inovasi yang mendukung daya saing daerah.

Arah kebijakan Bapperida juga ditujukan untuk mendorong terwujudnya tata kelola pembangunan yang adaptif terhadap perubahan, berorientasi pada kebutuhan masyarakat, serta selaras dengan agenda pembangunan jangka panjang. Dengan demikian, kebijakan yang dilaksanakan tidak hanya diarahkan untuk mencapai target kinerja jangka menengah, tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Secara rinci, arah kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025–2029 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3-4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

| NO. | OPERASIONALISASI NSPK | ARAH KEBIJAKAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD | KET. |
|-----|---|---|--|------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah sesuai sistem perencanaan pembangunan nasional. • Penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD sesuai peraturan perundangan yang berlaku. • Penyelenggaraan sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah. • Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan. | <ul style="list-style-type: none"> • Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah. • Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW. • Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas Nasional. • Perkuatan pengendalian Pembangunan melalui penerapan manajemen risiko. | <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan. • Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi perencanaan pembangunan. • Melaksanakan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan. | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan kajian dan inovasi pembangunan daerah sesuai NSPK litbang daerah. • Penguatan riset dan pengembangan kebijakan berbasis bukti. • Fasilitasi kolaborasi riset antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat. • Peningkatan kapasitas SDM perencana dan peneliti pembangunan daerah. | <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kemampuan Iptek, yang diikuti dengan penguatan inovasi untuk mendukung kemandirian dan daya saing daerah. • Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, Dunia Usaha dan Dunia Industri, masyarakat, baik dalam dan luar negeri. | <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan riset dan pengembangan perencanaan pembangunan. | |

3.5 Definisi Operasional dan Formula Perhitungan IKU OPD dan Program

Sebagai pedoman dalam pengukuran capaian kinerja dan sebagai upaya menjaga kualitas data kinerja pemerintah daerah, maka setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD dan Program harus memiliki definisi operasional serta rumus perhitungan yang baku. Adapun definisi dan formula perhitungan masing-masing indikator adalah sebagai berikut.

1. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah

Definisi Operasional

Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kualitas perencanaan pembangunan di tingkat daerah, termasuk kualitas pengendalian dan evaluasinya.

Formula Perhitungan

Nilai IPPD diperoleh dari hasil kajian perencanaan tahunan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga.

2. Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan

Definisi Operasional

Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kesesuaian antar-dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD/RPD, RKPD, Renstra PD, Renja PD) terhadap arah kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan daerah. Keselarasan dinilai melalui kesesuaian tujuan, sasaran, indikator, dan program/kegiatan.

Formula Perhitungan

Persentase jumlah dokumen perencanaan daerah yang telah selaras dengan dokumen perencanaan Nasional dan Provinsi.

3. Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Dokumen Perencanaan

Definisi Operasional

Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Dokumen Perencanaan adalah ukuran yang menggambarkan proporsi dokumen perencanaan yang ditetapkan sesuai batas waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (misal RPJMD/RPD, RKPD, Renstra PD, dan Renja PD). Ketepatan waktu dinilai berdasarkan tanggal penetapan dan ketentuan regulasi.

Formula Perhitungan

Persentase jumlah dokumen perencanaan yang ditetapkan sesuai jadwal ketentuan peraturan.

4. Persentase Kebijakan Berbasis Bukti

Definisi Operasional

Persentase Kebijakan Berbasis Bukti adalah persentase kebijakan, program, atau rekomendasi perencanaan yang disusun menggunakan data, analisis, dan bukti empiris yang valid. Kebijakan dianggap berbasis bukti apabila memuat analisis situasi, isu strategis, data indikator, hasil kajian/riset, atau evaluasi pembangunan sebelumnya.

Formula Perhitungan

Persentase kebijakan atau program daerah yang disusun berdasarkan hasil penelitian, kajian, atau inovasi daerah dibandingkan total kebijakan yang ditetapkan.

5. Indeks Daya Saing Daerah

Definisi Operasional

Indeks Daya Saing Daerah adalah indikator komposit yang mengukur kapasitas dan keunggulan daerah dalam menciptakan lingkungan ekonomi, sosial, dan pemerintahan yang kompetitif. Indeks ini mencerminkan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, ekonomi, inovasi, layanan publik, dan iklim investasi.

Formula Perhitungan

Bapperida mengirim data ke BRIN.

6. Indeks Inovasi Daerah

Definisi Operasional

Indeks Inovasi Daerah adalah ukuran yang menggambarkan tingkat kapasitas dan kinerja pemerintah daerah dalam mengembangkan, menerapkan, serta menyebarluaskan inovasi pemerintahan. Penilaian mencakup aspek kebijakan inovasi, budaya inovasi, kelembagaan, tata kelola, serta hasil inovasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Formula Perhitungan

Bapperida mengirim data ke Kemendagri.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

Strategi program untuk dapat mengimplementasikan dari visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo yang dioperasionalkan melalui strategi dan kebijakan, maka dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan program dan kegiatan yang direncanakan untuk dapat mewujudkan sasaran yang telah ditargetkan dalam kerangka konseptual melalui penjabaran RPJMD Tahun 2025-2029 serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi:

7. Program lintas SKPD yang dipergunakan untuk mengoperasionalkan dukungan operasional kantor beserta SDM dan sasaran serta prasarana Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
8. Program SKPD yang di arahkan untuk mengoperasinalkan target-target khusus perencanaan.
 - Program Lintas SKPD Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo
 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

➤ Program SKPD yang diarahkan untuk mengoperasionalkan target-target khusus perencanaan.

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a) Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
- b) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
- c) Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah

2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut

- a) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- b) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
- c) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayaham

3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a) Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
- b) Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
- c) Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
- d) Pengembangan Inovasi dan Teknologi

4. Program Riset dan Inovasi Daerah terdiri atas:

- a) Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan
- b) Invensi dan Inovasi

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo akan menyusun laporan kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran berupa keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing kegiatan. Indikator kinerja dapat diartikan sebagai suatu ukuran kuantitatif dan atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja dapat juga berfungsi:

1. Sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan atau setelah tahap kegiatan selesai dan berfungsi.
2. Sebagai ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kemajuan yang dicapai dalam perwujudan dari tujuan sasaran yang di tentukan.

Secara operasional, umumnya pada sektor publik, evaluasi dapat dilakukan terhadap kegiatan, program dan kebijakan. Terkait dengan program dan kegiatan ada beberapa indikator kinerja yang sering dipakai, yaitu:

1. Indikator masukan (input) adalah suatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, baik berupa dana, sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi dan informasi.
2. Indikator keluaran (output) adalah suatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik maupun nonfisik.

4.2 Uraian Kegiatan

Tabel 4-1 Uraian Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

| | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | KET |
|---|---|---|--|---|--|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Tata Kelola Pemerintah yang bersih dan transparan, serta Pelayanan Publik yang Unggul Berbasis Elektronik | Mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif, selaras dan efektif yang didukung oleh hasil-hasil penelitian | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan berkelanjutan di seluruh bidang pembangunan | Persentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan sarana dan prasarana perangkat daerah yang memadai | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Program |
| | | | | Prosentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kegiatan |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Sub Kegiatan |
| | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Sub Kegiatan |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|--------------|
| | | | | Prosentase dokumen pelaporan keuangan yang disusun tepat waktu | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kegiatan |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Sub Kegiatan |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Sub Kegiatan |
| | | | | Prosentase disiplin dan pengembangan kapasitas sumber daya aparatur yang terpenuhi | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kegiatan |
| | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Sub Kegiatan |
| | | | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Sub Kegiatan |
| | | | | Prosentase administrasi perkantoran sesuai SOP | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kegiatan |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Sub Kegiatan |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Sub Kegiatan |
| | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Sub Kegiatan |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
| | | | | | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Sub Kegiatan |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Sub Kegiatan |
| | | | | Prosentase sarana dan prasarana yang terpenuhi | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kegiatan |
| | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Sub Kegiatan |
| | | | | Prosentase administrasi perkantoran sesuai SOP | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kegiatan |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Sub Kegiatan |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Sub Kegiatan |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Sub Kegiatan |
| | | | | Prosentase sarana dan prasarana yang terpenuhi | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kegiatan |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--------------|
| | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Sub Kegiatan |
| | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Sub Kegiatan |
| | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Sub Kegiatan |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD - Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD | | | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Program |
| | | | | Prosentase Usulan yang diakomodir di dokumen perencanaan | | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Kegiatan |
| | | | | | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik | Pelaksanaan Konsultasi Publik | Sub Kegiatan |
| | | | | | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah | Sub Kegiatan |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|--------------|
| | | | | | | Daerah/Lintas Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | Sub Kegiatan |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Sub Kegiatan |
| | | | | Prosentase dokumen Analisa Data Pembangunan yang disusun sesuai dengan ketentuan | | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Kegiatan |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Sub Kegiatan |
| | | | | Prosentase dokumen perencanaan SKPD yang selaras | | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Kegiatan |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | Sub Kegiatan |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan | Sub Kegiatan |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--------------|
| | | | | | | Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | |
| | | | | Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | | Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | Kegiatan |
| | | | | | Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola | Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | Sub Kegiatan |
| | | | Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD | | | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Program |
| | | | | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Kegiatan |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Sub Kegiatan |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--------------|
| | | | | | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Sub Kegiatan |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Sub Kegiatan |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Sub Kegiatan |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Sub Kegiatan |
| | | | | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA | | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Kegiatan |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah | Sub Kegiatan |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--------------|
| | | | | | Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Sub Kegiatan |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Sub Kegiatan |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Sub Kegiatan |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Sub Kegiatan |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Sub Kegiatan |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|--|--------------|
| | | | | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Kegiatan |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Sub Kegiatan |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Sub Kegiatan |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Sub Kegiatan |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Sub Kegiatan |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|--|--------------|
| | | Meningkatnya hasil penelitian dan inovasi daerah dalam perumusan kebijakan pembangunan | Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah | | | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Program |
| | | | | Prosentase hasil penelitian yang dilaksanakan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | Kegiatan |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah | Sub Kegiatan |
| | | | | | Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | Sub Kegiatan |
| | | | | | Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan | Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan | Sub Kegiatan |
| | | | | Prosentase hasil penelitian yang dilaksanakan bidang sosial dan kependudukan | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | Kegiatan |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--------------|
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial | Sub Kegiatan |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan | Penelitian dan Pengembangan Kesehatan | Sub Kegiatan |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Sub Kegiatan |
| | | | | Prosentase hasil penelitian yang dilaksanakan bidang ekonomi dan pembangunan | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Kegiatan |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | Sub Kegiatan |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup | Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup | Sub Kegiatan |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan | Penelitian dan Pengembangan Kehutanan | Sub Kegiatan |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum | Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum | Sub Kegiatan |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan | Penelitian dan Pengembangan Perhubungan | Sub Kegiatan |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|---|--------------|
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman | Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman | Sub Kegiatan |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan | Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan | Sub Kegiatan |
| | | | | | Indeks inovasi daerah | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Kegiatan |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Sub Kegiatan |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | Sub Kegiatan |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual | Sub Kegiatan |
| | | | Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan | | | PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH | Program |
| | | | | Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Yang Terlaksana Secara Efektif dan Terukur | | Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan | Kegiatan |
| | | | | | Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan | Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan | Sub Kegiatan |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--------------|
| | | | | | Jumlah Naskah Kebijakan Berbasis Hasil Riset | Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset | Sub Kegiatan |
| | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan Penelitaian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan | Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan | Sub Kegiatan |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan | Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan | Sub Kegiatan |
| | | | | | Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi di Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, Kerja Sama Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Serta Kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan | Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan | Sub Kegiatan |
| | | | | Persentase pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan inovasi daerah sesuai rencana | | Invensi dan Inovasi | Kegiatan |
| | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penguatan Kelembagaan Riset dan Inovasi di Daerah | Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penguatan Kelembagaan Riset dan Inovasi di Daerah | Sub Kegiatan |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--------------|
| | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan Untuk Promosi dan Kampanye Inovasi | Fasilitasi dan Pembinaan Untuk Promosi dan Kampanye Inovasi | Sub Kegiatan |
| | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan Untuk Penyelenggaraan Pengembangan Klaster Inovasi Berbasis Produk Unggulan Daerah Daerah dan/atau Mengatasi Permasalahan Daerah | Fasilitasi dan Pembinaan Untuk Penyelenggaraan Pengembangan Klaster Inovasi Berbasis Produk Unggulan Daerah Daerah | Sub Kegiatan |
| | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Prakarsa Pengembangan Riset dan Inovasi di Daerah Berdasarkan Kebutuhan Daerah untuk Promosi Produk Unggulan Daerah dan/atau Mengatasi Permasalahan Daerah | Fasilitasi dan Pembinaan untuk Prakarsa Pengembangan Riset dan Inovasi di Daerah Berdasarkan Kebutuhan Daerah untuk Promosi Produk Unggulan Daerah dan/atau Mengatasi Permasalahan Daerah | Sub Kegiatan |
| | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penguatan Kerjasama Internasional | Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penguatan Kerjasama Internasional | Sub Kegiatan |
| | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Peningkatan Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual (Pelatihan Perlindungan KI, Fasilitas Perlindungan KI) | Fasilitasi dan Pembinaan untuk Peningkatan Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual | Sub Kegiatan |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--------------|
| | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penyesuaian Kebijakan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah | Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penyesuaian Kebijakan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah | Sub Kegiatan |
| | | | | | Laporan Pemantauan dan Evaluasi Inovasi dan Inovasi | Pemantauan dan Evaluasi Inovasi dan Inovasi | Sub Kegiatan |

4.3 Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Tabel 4-2 Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

| BIDANG URUSAN / PROGRAM/OUT-COME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | KET |
|---|--|---------------|---------------------------------|---------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase cakupan pelayanan administrasi Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang sesuai SOP | 7.296.777.763 | 90% | 7.456.203.970 | 100% | 7.732.747.835,86 | 100% | 7.752.079.705,39 | 100% | 7.945.881.697,83 | 100% | 8.144.528.740,19 | 100% | 8.266.696.671,16 | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Prosentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu | 11.000.000 | 90% | 15.000.000 | 100% | 15.000.000 | 100% | 22.000.000 | 100% | 23.000.000 | 100% | 30.000.000 | 100% | 35.000.000 | |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 8.000.000 | 1 Dokumen | 10.000.000 | 1 Dokumen | 10.000.000 | 1 Dokumen | 15.000.000 | 1 Dokumen | 15.000.000 | 1 Dokumen | 20.000.000 | 1 Dokumen | 25.000.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM/OUT-COME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | KET |
|---|--|----------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3.000.000 | 1 Laporan | 5.000.000 | 1 Laporan | 5.000.000 | 1 Laporan | 7.000.000 | 1 Laporan | 8.000.000 | 1 Laporan | 10.000.000 | 1 Laporan | 10.000.000 | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Prosentase dokumen pelaporan keuangan yang disusun tepat waktu | 5.578.091.600 | 90% | 6.023.694.700 | 100% | 6.026.774.870 | 100% | 6.216.774.870 | 100% | 6.311.774.870 | 100% | 6.426.774.870 | 100% | 6.526.774.870 | |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 5.274.870.000 | 67 Orang/ bulan | 5.704.632.100 | 67 Orang/ bulan | 5.706.774.870 | 67 Orang/ bulan | 5.906.774.870 | 67 Orang/ Bulan | 5.996.774.870 | 67 Orang/ bulan | 6.106.774.870 | 67 Orang/ bulan | 6.206.774.870 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM/OUT-COME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | KET |
|---|---|--------------------|---------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-----|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 303.221.600 | 3 Dokumen | 319.062.600 | 3 Dokumen | 320.000.000 | 3 Dokumen | 310.000.000 | 3 Dokumen | 315.000.000 | 3 Dokumen | 320.000.000 | 3 Dokumen | 320.000.000 | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Prosentase disiplin dan pengembangan kapasitas sumber daya aparatur yang terpenuhi | 204.500.000 | 90% | 92.480.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 220.000.000 | 100% | 220.000.000 | 100% | 220.000.000 | |
| Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | - | 65 Paket | - | 65 Paket | - | 65 Paket | - | 65 Paket | - | 65 Paket | - | 65 Paket | - | |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 204.500.000 | 65 Orang | 92.480.000 | 65 Orang | 200.000.000 | 65 Orang | 200.000.000 | 65 Orang | 220.000.000 | 65 Orang | 220.000.000 | 65 Orang | 220.000.000 | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Prosentase administrasi perkantoran sesuai SOP | 430.962.441 | 95% | 392.750.000 | 100% | 575.000.000 | 100% | 608.153.659 | 100% | 618.656.666 | 100% | 653.704.233 | 100% | 682.656.001 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM/OUT-COME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | KET |
|---|---|--------------------|---------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-----|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 70.189.041 | 79 Paket | 74.000.000 | 79 Paket | 135.000.000 | 79 Paket | 155.000.000 | 79 Paket | 155.000.000 | 79 Paket | 165.000.000 | 79 Paket | 165.952.501 | |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 98.998.800 | 24 Paket | 100.000.000 | 24 Paket | 100.000.000 | 24 Paket | 110.000.000 | 24 Paket | 119.000.000 | 24 Paket | 119.000.000 | 24 Paket | 119.000.000 | |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 90.798.000 | 12870 Paket | 120.486.000 | 12870 Paket | 150.000.000 | 12870 Paket | 152.653.659 | 12870 Paket | 154.156.666 | 12870 Paket | 164.204.233 | 12870 Paket | 174.203.500 | |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 24.976.600 | 5 Paket | 22.000.000 | 5 Paket | 25.000.000 | 5 Paket | 25.000.000 | 5 Paket | 25.000.000 | 5 Paket | 40.000.000 | 5 Paket | 48.000.000 | |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 146.000.000 | 2 Laporan | 76.264.000 | 2 Laporan | 165.000.000 | 2 Laporan | 165.500.000 | 2 Laporan | 165.500.000 | 2 Laporan | 165.500.000 | 2 Laporan | 175.500.000 | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Prosentase sarana dan prasarana yang terpenuhi | 295.906.470 | 95% | 350.400.000 | 100% | 274.000.000 | 100% | 278.000.000 | 100% | 290.000.000 | 100% | 290.000.000 | 100% | 290.000.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM/OUT-COME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | KET |
|--|--|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|-----|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 295.906.470 | 4 Unit | 350.400.000 | 4 Unit | 274.000.000 | 4 Unit | 278.000.000 | 4 Unit | 290.000.000 | 4 Unit | 290.000.000 | 4 Unit | 290.000.000 | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase administrasi perkantoran sesuai SOP | 223.297.129 | 95% | 259.839.270 | 100% | 246.000.000 | 100% | 286.000.000 | 100% | 290.000.000 | 100% | 290.000.000 | 100% | 300.000.000 | |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 15.000.000 | 1200 Laporan | - | 1200 Laporan | - | 1200 Laporan | - | 1200 Laporan | - | 1200 Laporan | - | 1200 Laporan | - | |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 167.292.129 | 1 Laporan | 185.839.270 | 1 Laporan | 186.000.000 | 1 Laporan | 196.000.000 | 1 Laporan | 200.000.000 | 1 Laporan | 200.000.000 | 1 Laporan | 200.000.000 | |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 41.005.000 | 1 Laporan | 74.000.000 | 1 Laporan | 60.000.000 | 1 Laporan | 90.000.000 | 1 Laporan | 90.000.000 | 1 Laporan | 90.000.000 | 1 Laporan | 100.000.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM/OUT-COME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | KET |
|---|---|---------------|---------------------------------|-------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|-----|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase sarana dan prasarana yang terpenuhi | 553.020.123 | 95% | 322.040.000 | 100% | 395.972.965,86 | 100% | 141.151.176,39 | 100% | 192.450.161,83 | 100% | 234.049.637,19 | 100% | 212.265.800,16 | |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 265.121.623 | 6 Unit | 232.000.000 | 6 Unit | 315.972.965,86 | 6 Unit | 53.151.176,39 | 6 Unit | 100.450.161,83 | 6 Unit | 142.049.637,19 | 6 Unit | 120.265.800,16 | |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 210.000.000 | 7 Unit | - | 7 Unit | - | 7 Unit | - | 7 Unit | - | 7 Unit | - | 7 Unit | - | |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 77.898.500 | 2 Unit | 90.040.000 | 2 Unit | 80.000.000 | 2 Unit | 88.000.000 | 2 Unit | 92.000.000 | 2 Unit | 92.000.000 | 2 Unit | 92.000.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM/OUT-COME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | KET |
|--|---|---------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-----|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD | 1.854.145.100 | 90% | 1.750.699.825 | 90% | 2.775.699.825 | 90% | 3.525.699.825 | 90% | 3.701.234.816,25 | 90% | 4.385.531.000 | 90% | 4.853.526.950 | |
| | Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD | | 92% | | 90% | | 90% | | 90% | | 90% | | 90% | | |
| Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Prosentase Usulan yang Diakomodir Didokumen Perencanaan | 1.440.550.000 | 80% | 1.552.502.325 | 90% | 2.093.895.000 | 90% | 2.678.445.000 | 90% | 2.814.867.000 | 90% | 3.347.810.000 | 90% | 3.712.161.000 | |
| Pelaksanaan Konsultasi Publik | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik | 22.450.000 | 2 Berita Acara | 36.000.000 | 1 Berita Acara | 150.000.000 | 1 Berita Acara | 160.000.000 | 1 Berita Acara | 170.000.000 | 1 Berita Acara | 180.000.000 | 2 Berita Acara | 190.000.000 | |
| Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah | 19.600.000 | 3 Berita Acara | 53.500.000 | 3 Berita Acara | 30.000.000 | 3 Berita Acara | 40.000.000 | 3 Berita Acara | 50.000.000 | 3 Berita Acara | 60.000.000 | 3 Berita Acara | 70.000.000 | |
| Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/ Kota | 279.500.000 | 2 Berita Acara | 480.000.000 | 1 Berita Acara | 450.000.000 | 1 Berita Acara | 475.000.000 | 1 Berita Acara | 500.000.000 | 1 Berita Acara | 550.000.000 | 2 Berita Acara | 600.000.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM/OUT-COME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | KET |
|--|---|---------------|---------------------------------|-------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|-----|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/ RKPD) | 1.119.000.000 | 4 Dokumen | 983.002.325 | 2 Dokumen | 1.463.895.000 | 2 Dokumen | 2.003.445.000 | 2 Dokumen | 2.094.867.000 | 3 Dokumen | 2.557.810.000 | 3 Dokumen | 2.852.161.000 | |
| Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Prosentase dokumen Analisa Data Pembangunan yang disusun sesuai dengan ketentuan | - | - | - | 90% | 50.000.000 | 90% | 50.000.000 | 90% | 50.000.000 | 90% | 50.000.000 | 90% | 50.000.000 | |
| Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | - | - | - | 1 Dokumen | 50.000.000 | 1 Dokumen | 50.000.000 | 1 Dokumen | 50.000.000 | 1 Dokumen | 50.000.000 | 1 Dokumen | 50.000.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM/OUT-COME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | KET |
|--|--|---------------|---------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Prosentase Dokumen Perencanaan OPD yang selaras | 413.595.100 | 84% | 162.656.225 | 90% | 523.427.000 | 90% | 659.327.000 | 90% | 691.543.000 | 90% | 815.955.000 | 90% | 901.182.200 | |
| Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan | 374.000.000 | 1 Laporan | 34.711.325 | 1 Laporan | 233.432.000 | 1 Laporan | 351.611.000 | 1 Laporan | 329.191.000 | 1 Laporan | 386.936.000 | 1 Laporan | 410.597.000 | |
| Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah | 39.595.100 | 3 Laporan | 127.944.900 | 3 Laporan | 289.995.000 | 3 Laporan | 307.716.000 | 3 Laporan | 362.352.000 | 3 Laporan | 429.019.000 | 3 Laporan | 490.585.200 | |
| Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | - | - | 35.541.275 | 90% | 108.377.825 | 90% | 137.927.825 | 90% | 144.824.816,25 | 90% | 171.766.000 | 90% | 190.183.750 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM/OUT-COME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | KET |
|--|---|---------------|---------------------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|----------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola | - | 1 Dokumen | 35.541.275 | 1 Dokumen | 108.377.825 | 1 Dokumen | 137.927.825 | 1 Dokumen | 144.824.816,25 | 1 Dokumen | 171.766.000 | 1 Dokumen | 190.183.750 | |
| PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 1.042.421.471 | 92% | 1.164.377.180 | 84% | 2.014.377.180 | 84% | 2.014.377.180 | 84% | 2.130.814.898 | 84% | 2.247.252.616 | 84% | 2.763.690.334 | |
| | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA | | 82% | | 92% | | 92% | | 92% | | 92% | | 92% | | |
| | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | | 74% | | 84% | | 84% | | 84% | | 84% | | 84% | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM/OUT-COME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | KET |
|---|--|---------------|---------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Prosentase usulan bidang sosial budaya yang diakomodir di dokumen perencanaan | 641.177.571 | 82% | 591.586.180 | 84% | 916.743.000 | 84% | 916.743.000 | 84% | 969.733.000 | 84% | 1.022.724.000 | 84% | 1.257.755.000 | |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 121.623.800 | 1 Dokumen | 60.786.180 | 1 Dokumen | 119.635.000 | 1 Dokumen | 119.635.000 | 1 Dokumen | 126.550.000 | 1 Dokumen | 133.466.000 | 1 Dokumen | 164.137.000 | |
| Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 31.500.000 | 1 Laporan | 18.150.000 | 1 Laporan | 51.429.000 | 1 Laporan | 51.429.000 | 1 Laporan | 54.402.000 | 1 Laporan | 57.375.000 | 1 Laporan | 70.560.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM/OUT-COME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | KET |
|--|---|---------------|---------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 211.553.771 | 1 Dokumen | 250.000.000 | 1 Dokumen | 351.754.000 | 1 Dokumen | 351.754.000 | 1 Dokumen | 372.087.000 | 1 Dokumen | 392.419.000 | 1 Dokumen | 482.601.000 | |
| Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 26.500.000 | 1 Laporan | 12.650.000 | 1 Laporan | 42.170.000 | 1 Laporan | 42.170.000 | 1 Laporan | 44.608.000 | 1 Laporan | 47.045.000 | 1 Laporan | 57.857.000 | |
| Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia | 250.000.000 | 1 Laporan | 250.000.000 | 1 Laporan | 351.755.000 | 1 Laporan | 351.755.000 | 1 Laporan | 372.086.000 | 1 Laporan | 392.419.000 | 1 Laporan | 482.600.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM/OUT-COME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | KET |
|--|--|---------------|---------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Prosentase usulan yang diakomodir di dokumen perencanaan lingkup perekonomian dan SDA | 141.621.800 | 82% | 258.300.000 | 92% | 492.515.000 | 92% | 492.515.000 | 92% | 520.984.000 | 92% | 549.453.000 | 92% | 675.722.000 | |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 30.377.800 | 1 Dokumen | 75.000.000 | 1 Dokumen | 140.712.000 | 1 Dokumen | 140.712.000 | 1 Dokumen | 148.845.000 | 1 Dokumen | 156.979.000 | 1 Dokumen | 193.054.000 | |
| Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 29.500.000 | 1 Laporan | 38.250.000 | 1 Laporan | 70.361.000 | 1 Laporan | 70.361.000 | 1 Laporan | 74.428.000 | 1 Laporan | 78.495.000 | 1 Laporan | 96.534.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM/OUT-COME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | KET |
|---|--|---------------|---------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 22.000.000 | 1 Laporan | 31.000.000 | 1 Laporan | 70.361.000 | 1 Laporan | 70.361.000 | 1 Laporan | 74.428.000 | 1 Laporan | 78.495.000 | 1 Laporan | 96.534.000 | |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 23.024.000 | 1 Dokumen | 31.000.000 | 1 Dokumen | 70.361.000 | 1 Dokumen | 70.361.000 | 1 Dokumen | 74.428.000 | 1 Dokumen | 78.495.000 | 1 Dokumen | 96.534.000 | |
| Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 14.720.000 | 1 Laporan | 36.400.000 | 1 Laporan | 70.361.000 | 1 Laporan | 70.361.000 | 1 Laporan | 74.428.000 | 1 Laporan | 78.495.000 | 1 Laporan | 96.534.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM/OUT-COME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | KET |
|--|---|--------------------|---------------------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|-----|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 22.000.000 | 1 Laporan | 46.650.000 | 1 Laporan | 70.359.000 | 1 Laporan | 70.359.000 | 1 Laporan | 74.427.000 | 1 Laporan | 78.494.000 | 1 Laporan | 96.532.000 | |
| Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Prosentase usulan yang diakomodir di dokumen perencanaan lingkup prasarana | 259.622.100 | 74% | 314.491.000 | 84% | 605.119.180 | 84% | 605.119.180 | 84% | 640.097.898 | 84% | 675.075.616 | 84% | 830.213.334 | |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 120.068.100 | 1 Dokumen | 141.555.000 | 1 Dokumen | 253.303.000 | 1 Dokumen | 253.303.000 | 1 Dokumen | 267.945.000 | 1 Dokumen | 282.586.000 | 1 Dokumen | 347.527.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM/OUT-COME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | KET |
|--|---|---------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 44.927.500 | 1 Laporan | 31.000.000 | 1 Laporan | 70.375.000 | 1 Laporan | 70.375.000 | 1 Laporan | 74.443.000 | 1 Laporan | 78.511.000 | 1 Laporan | 96.554.000 | |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 54.961.600 | 200 Dokumen | 110.936.000 | 200 Dokumen | 211.066.000 | 200 Dokumen | 211.066.000 | 200 Dokumen | 223.266.000 | 200 Dokumen | 235.466.000 | 200 Dokumen | 289.578.000 | |
| Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 39.664.000 | 1 Laporan | 31.000.000 | 1 Laporan | 70.375.180 | 1 Laporan | 70.375.180 | 1 Laporan | 74.443.898 | 1 Laporan | 78.512.616 | 1 Laporan | 96.554.334 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM/OUT-COME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | KET |
|--|--|--------------------|---------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-----|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah | 949.304.400 | 90% | 1.318.578.075 | 100% | 1.318.578.075 | 100% | 1.318.578.075 | 100% | 1.384.506.978 | 100% | 1.453.732.327 | 100% | 1.526.418.944 | |
| Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | Prosentase hasil penelitian yang dilaksanakan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan | 254.999.700 | 90% | 147.340.250 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | |
| Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah | - | - | - | 1 Laporan | 50.000.000 | 1 Laporan | 50.000.000 | 1 Laporan | 50.000.000 | 1 Laporan | 50.000.000 | 1 Laporan | 50.000.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM/OUT-COME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | KET |
|--|--|--------------------|---------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|-----|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik | 254.999.700 | 1 Laporan | 147.340.250 | 1 Laporan | 75.000.000 | 1 Laporan | 75.000.000 | 1 Laporan | 75.000.000 | 1 Laporan | 75.000.000 | 1 Laporan | 75.000.000 | |
| Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan | Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan | - | - | - | 1 Rekomendasi | 25.000.000 | 1 Rekomendasi | 25.000.000 | 1 Rekomendasi | 25.000.000 | 1 Rekomendasi | 25.000.000 | 1 Rekomendasi | 25.000.000 | |
| Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | Prosentase hasil penelitian yang dilaksanakan bidang sosial dan kependudukan | 309.999.800 | 90% | 398.613.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 304.506.978 | 100% | 350.000.000 | 100% | 350.000.000 | |
| Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial | 309.999.800 | 1 Dokumen | 398.613.000 | 1 Dokumen | 150.000.000 | 1 Dokumen | 150.000.000 | 1 Dokumen | 204.506.978 | 1 Dokumen | 250.000.000 | 1 Dokumen | 250.000.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM/OUT-COME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | KET |
|--|---|--------------------|---------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-----|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Penelitian dan Pengembangan Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan | - | - | - | 1 Dokumen | 50.000.000 | 1 Dokumen | 50.000.000 | 1 Dokumen | 50.000.000 | 1 Dokumen | 50.000.000 | 1 Dokumen | 50.000.000 | |
| Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | - | - | - | 1 Dokumen | 50.000.000 | 1 Dokumen | 50.000.000 | 1 Dokumen | 50.000.000 | 1 Dokumen | 50.000.000 | 1 Dokumen | 50.000.000 | |
| Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Prosentase hasil penelitian yang dilaksanakan bidang ekonomi dan pembangunan | 150.000.000 | 90% | 173.768.450 | 100% | 480.000.000 | 100% | 480.000.000 | 100% | 480.000.000 | 100% | 480.000.000 | 100% | 480.000.000 | |
| Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | 150.000.000 | 1 Dokumen | 173.768.450 | 1 Dokumen | 180.000.000 | 1 Dokumen | 180.000.000 | 1 Dokumen | 180.000.000 | 1 Dokumen | 180.000.000 | 1 Dokumen | 180.000.000 | |
| Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup | - | - | - | 1 Dokumen | 50.000.000 | 1 Dokumen | 50.000.000 | 1 Dokumen | 50.000.000 | 1 Dokumen | 50.000.000 | 1 Dokumen | 50.000.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM/OUT-COME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | KET |
|---|---|---------------|---------------------------------|------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Penelitian dan Pengembangan Kehutanan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan | - | - | - | 1 Dokumen | 50.000.000 | 1 Dokumen | 50.000.000 | 1 Dokumen | 50.000.000 | 1 Dokumen | 50.000.000 | 1 Dokumen | 50.000.000 | |
| Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum | - | - | - | 1 Dokumen | 50.000.000 | 1 Dokumen | 50.000.000 | 1 Dokumen | 50.000.000 | 1 Dokumen | 50.000.000 | 1 Dokumen | 50.000.000 | |
| Penelitian dan Pengembangan Perhubungan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan | - | - | - | 1 Dokumen | 50.000.000 | 1 Dokumen | 50.000.000 | 1 Dokumen | 50.000.000 | 1 Dokumen | 50.000.000 | 1 Dokumen | 50.000.000 | |
| Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman | - | - | - | 1 Dokumen | 50.000.000 | 1 Dokumen | 50.000.000 | 1 Dokumen | 50.000.000 | 1 Dokumen | 50.000.000 | 1 Dokumen | 50.000.000 | |
| Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan | - | - | - | 1 Dokumen | 50.000.000 | 1 Dokumen | 50.000.000 | 1 Dokumen | 50.000.000 | 1 Dokumen | 50.000.000 | 1 Dokumen | 50.000.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM/OUT-COME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | KET |
|--|---|--------------------|---------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-----|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Indeks inovasi daerah | 234.304.900 | 90% | 598.856.375 | 100% | 438.578.075 | 100% | 438.578.075 | 100% | 450.000.000 | 100% | 473.732.327 | 100% | 546.418.944 | |
| Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | 234.304.900 | 1 Dokumen | 598.856.375 | 1 Dokumen | 363.578.075 | 1 Dokumen | 363.578.075 | 1 Dokumen | 375.000.000 | 1 Dokumen | 398.732.327 | 1 Dokumen | 471.418.944 | |
| Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | - | - | - | 1 Laporan | 25.000.000 | 1 Laporan | 25.000.000 | 1 Laporan | 25.000.000 | 1 Laporan | 25.000.000 | 1 Laporan | 25.000.000 | |
| Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual | - | - | - | 1 Laporan | 50.000.000 | 1 Laporan | 50.000.000 | 1 Laporan | 50.000.000 | 1 Laporan | 50.000.000 | 1 Laporan | 50.000.000 | |
| PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH | Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan | - | - | - | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 750.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM/OUT-COME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | KET |
|--|--|---------------|---------------------------------|------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan | Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan yang terlaksana secara efektif dan terukur | - | - | - | 100% | 270.000.000 | 100% | 270.000.000 | 100% | 380.000.000 | 100% | 460.000.000 | 100% | 685.000.000 | |
| Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan | Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan | - | - | - | 1 Laporan | 30.000.000 | 1 Laporan | 30.000.000 | 1 Laporan | 50.000.000 | 1 Laporan | 65.000.000 | 1 Laporan | 120.000.000 | |
| Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset | Jumlah Naskah Kebijakan Berbasis Hasil Riset | - | - | - | 1 Naskah | 30.000.000 | 1 Naskah | 30.000.000 | 1 Naskah | 50.000.000 | 1 Naskah | 65.000.000 | 1 Naskah | 120.000.000 | |
| Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan | Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan | - | - | - | 1 Laporan | 30.000.000 | 1 Laporan | 30.000.000 | 1 Laporan | 50.000.000 | 1 Laporan | 75.000.000 | 1 Laporan | 120.000.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM/OUT-COME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | KET |
|--|--|---------------|---------------------------------|------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-----|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | |
| Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan | - | - | - | 1 Laporan | 30.000.000 | 1 Laporan | 30.000.000 | 1 Laporan | 50.000.000 | 1 Laporan | 75.000.000 | 1 Laporan | 125.000.000 | |
| Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan | Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi di Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, Kerja Sama Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Serta Kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan | - | - | - | 1 Pelatihan | 150.000.000 | 1 Pelatihan | 150.000.000 | 1 Pelatihan | 180.000.000 | 1 Pelatihan | 180.000.000 | 1 Pelatihan | 200.000.000 | |
| Invensi dan Inovasi | Persentase pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan inovasi daerah sesuai rencana | - | - | - | 100% | 230.000.000 | 100% | 230.000.000 | 100% | 370.000.000 | 100% | 540.000.000 | 100% | 815.000.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM/OUT-COME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | KET |
|--|---|---------------|---------------------------------|------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Fasilitasi dan Pembinaan Untuk Penguatan Kelembagaan Riset dan Inovasi di Daerah | Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan Untuk Penguatan Kelembagaan Riset dan Inovasi di Daerah | - | - | - | 1 Laporan | 30.000.000 | 1 Laporan | 30.000.000 | 1 Laporan | 50.000.000 | 1 Laporan | 75.000.000 | 1 Laporan | 100.000.000 | |
| Fasilitasi dan Pembinaan Untuk Promosi dan Kampanye Inovasi | Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan Untuk Promosi dan Kampanye Inovasi | - | - | - | 1 Laporan | 30.000.000 | 1 Laporan | 30.000.000 | 1 Laporan | 50.000.000 | 1 Laporan | 75.000.000 | 1 Laporan | 100.000.000 | |
| Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penyelenggaraan Pengembangan Klaster Inovasi Berbasis Produk Unggulan Daerah Daerah | Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan Untuk Penyelenggaraan Pengembangan Klaster Inovasi Berbasis Produk Unggulan Daerah dan/atau Mengatasi Permasalahan Daerah | - | - | - | 1 Laporan | 30.000.000 | 1 Laporan | 30.000.000 | 1 Laporan | 50.000.000 | 1 Laporan | 75.000.000 | 1 Laporan | 100.000.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM/OUT-COME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | KET |
|---|--|---------------|---------------------------------|------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Fasilitasi dan Pembinaan untuk Prakarsa Pengembangan Riset dan Inovasi di Daerah Berdasarkan Kebutuhan Daerah untuk Promosi Produk Unggulan Daerah dan/atau Mengatasi Permasalahan Daerah | Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Prakarsa Pengembangan Riset dan Inovasi Di Daerah Berdasarkan Kebutuhan Daerah untuk Promosi Produk Unggulan Daerah dan/atau Mengatasi Permasalahan Daerah | - | - | - | 1 Laporan | 30.000.000 | 1 Laporan | 30.000.000 | 1 Laporan | 50.000.000 | 1 Laporan | 75.000.000 | 1 Laporan | 125.000.000 | |
| Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penguatan Kerjasama Internasional | Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penguatan Kerjasama Internasional | - | - | - | 1 Laporan | 15.000.000 | 1 Laporan | 15.000.000 | 1 Laporan | 15.000.000 | 1 Laporan | 15.000.000 | 1 Laporan | 15.000.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM/OUT-COME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | KET |
|--|--|---------------|---------------------------------|------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Fasilitasi dan Pembinaan untuk Peningkatan Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual | Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Peningkatan Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual (Pelatihan Perlindungan KI, Fasilitas Perlindungan KI) | - | - | - | 1 Laporan | 30.000.000 | 1 Laporan | 30.000.000 | 1 Laporan | 50.000.000 | 1 Laporan | 75.000.000 | 1 Laporan | 125.000.000 | |
| Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penyesuaian Kebijakan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penyesuaian Kebijakan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah | - | - | - | 1 Laporan | 30.000.000 | 1 Laporan | 30.000.000 | 1 Laporan | 50.000.000 | 1 Laporan | 75.000.000 | 1 Laporan | 125.000.000 | |
| Pemantauan dan Evaluasi Inovasi dan Inovasi | Laporan Pemantauan dan Evaluasi Inovasi dan Inovasi | - | - | - | 1 Laporan | 35.000.000 | 1 Laporan | 35.000.000 | 1 Laporan | 55.000.000 | 1 Laporan | 75.000.000 | 1 Laporan | 125.000.000 | |

4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Tabel 4-3 Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

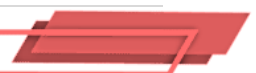
| NO | PROGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | KET |
|-------------------|--|--|--|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Unsur Perencanaan | | | | |
| 1 | Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah | <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Konsultasi Publik - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota • Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah <ul style="list-style-type: none"> - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah • Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | |

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | |
| 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia | <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | |

| | | | | |
|--|--|---|---|--|
| | | <p>Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | |
| | | <p>Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | |



| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | |
|--|--|--|---|--|



| Unsur Penelitian dan Pengembangan | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|
| 3 | Penelitian dan Pengembangan Daerah | Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan | <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah - Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan - Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan |
| | | Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan | <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan <ul style="list-style-type: none"> - Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial - Penelitian dan Pengembangan Kesehatan |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah | <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan <ul style="list-style-type: none"> - Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan - Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup - Penelitian dan Pengembangan Kehutanan - Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum - Penelitian dan Pengembangan Perhubungan - Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman - Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan |
| | | Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, | <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Inovasi dan Teknologi <ul style="list-style-type: none"> - Penelitian, Pengembangan, |

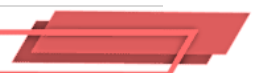
| | | | | |
|---|--------------------------|--|--|--|
| | | pengkajian dan penerapan di daerah | <p>dan</p> <p>Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan - Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual | |
| 4 | Riset dan Inovasi Daerah | <p>Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan</p> <hr/> <p>Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan <ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan - Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset - Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan - Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan - Bimbingan teknis dan supervisi di | |



| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan |
| | | Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah | <ul style="list-style-type: none"> • Invensi dan Inovasi <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi dan Pembinaan Untuk Penguatan Kelembagaan Riset dan Inovasi di Daerah - Fasilitasi dan Pembinaan Untuk Promosi dan Kampanye Inovasi - Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penyelenggaraan Pengembangan Klaster Inovasi Berbasis Produk Unggulan Daerah Daerah - Fasilitasi dan Pembinaan untuk Prakarsa Pengembangan Riset dan Inovasi di |
| | | Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah | |



| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | <p>Daerah Berdasarkan Kebutuhan Daerah untuk Promosi Produk Unggulan Daerah dan/atau Mengatasi Permasalahan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penguatan Kerjasama Internasional - Fasilitasi dan Pembinaan untuk Peningkatan Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual - Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penyesuaian Kebijakan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah - Pemantauan dan Evaluasi Investasi dan Inovasi | |
|--|--|--|--|--|



4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Tabel 4-4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

| NO | INDIKATOR | SATUAN | TARGET TAHUN | | | | | | KET. |
|-----|--|--------|--------------|-------|-------|------|-------|-------|------|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah | Indeks | 89,24 | 89,26 | 89,28 | 89,3 | 89,32 | 89,34 | |
| 2 | Persentase keselarasan dokumen perencanaan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 3 | Persentase Kebijakan Berbasis Bukti | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 4 | Indeks Daya Saing Daerah | Angka | 3.76 | 3.77 | 3.78 | 3.79 | 3.8 | 3.81 | |
| 5 | Persentase ketepatan waktu penetapan dokumen perencanaan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 6 | Indeks Inovasi Daerah | Angka | 53,68 | 54 | 55 | 57 | 61 | 61,5 | |

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 4-5 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

| NO | INDIKATOR | SATUAN | TARGET TAHUN | | | | | | KET. |
|-----|--|--------|--------------|-------|-------|------|-------|-------|------|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | Perencanaan | | | | | | | | |
| 1. | Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah | Indeks | 89,24 | 89,26 | 89,28 | 89,3 | 89,32 | 89,34 | |
| 2. | Persentase keselarasan dokumen perencanaan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|-----|-----|-----|-----|------|--|
| 3. | Persentase ketepatan waktu penetapan dokumen perencanaan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Penelitian dan Pengembangan | | | | | | | | | |
| 1. | Persentase Kebijakan Berbasis Bukti | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 2. | Indeks Inovasi Daerah | Angka | 53,68 | 54 | 55 | 57 | 61 | 61,5 | |



BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025–2029 merupakan pedoman perencanaan yang disusun dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2025–2029. Renstra ini memuat rencana program dan kegiatan yang bersifat mendasar serta berfokus pada pencapaian target-target yang telah ditetapkan untuk lima tahun ke depan.

Rencana Strategis mencakup tujuan, sasaran, kebijakan, serta program yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran organisasi guna mencapai tujuan serta menjalankan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan serta menjadi dasar untuk evaluasi dan pelaporan kinerja tahunan maupun lima tahunan.


Dengan memadukan berbagai keahlian serta sumber daya yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, penyusunan Renstra diharapkan dapat mengantisipasi sekaligus merespons dinamika perkembangan lingkungan strategis, baik di lingkungan internal Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah maupun dalam cakupan wilayah Kabupaten.

Dengan tersusunnya Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025–2029, diharapkan dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak serta mendukung pencapaian Kabupaten Ponorogo 2025–2029.

Ponorogo, 19 September 2025

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Ponorogo




Dr. Agus Sugiarto, M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196804131988091002